



Original Article

Triangulasi Kesenjangan Digital: Trajektori Inklusi Keuangan Indonesia dalam Konteks ASEAN Pasca-Findex 2025

Husni Mubarak^{1✉}, Selly Kudrati Ningsih², Airul Syahrif³, Firsty Ramadhona Amalia Lubis⁴, Nurul Azizah Az zakiyyah⁵, Lestari Sukarniati⁶, Yunizarrahman⁷

^{1,2,3}Universitas Negeri Makassar, Makassar

^{4,5,6}Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

⁷Sekolah Tinggi Administrasi Tabalong, Tabalong.

Correspondence Author: husni.mubarak@unm.ac.id✉

Abstract:

Penelitian ini menyajikan analisis triangulatif terhadap lanskap inklusi keuangan digital Indonesia, dengan membandingkannya terhadap negara-negara tetangga di ASEAN. Dengan memanfaatkan basis data Global Findex 2025 dari Bank Dunia yang baru dirilis—yang mencakup indikator-indikator baru terkait konektivitas dan keamanan digital—penelitian ini memetakan posisi Indonesia dalam hal adopsi pembayaran digital dan kesenjangan gender. Temuan dari survei sisi permintaan (demand-side) ini kemudian dianalisis secara kontekstual dengan kerangka kebijakan regional ASEAN, seperti inisiatif Konektivitas Pembayaran Regional (Regional Payment Connectivity) dan toolkit kebijakan untuk UMKM digital. Sebagai pilar ketiga triangulasi, data survei global ini disandingkan dengan data pasar dan regulasi domestik sisi penawaran (supply-side) pasca-2024 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, yang mencakup pertumbuhan layanan keuangan digital seperti Buy Now, Pay Later (BNPL) dan penguatan kerangka perlindungan konsumen. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Indonesia menunjukkan kemajuan pesat dalam adopsi pembayaran digital yang didorong oleh kebijakan, keberhasilan ini menutupi tantangan mendasar dalam hal ketahanan keuangan dan kesenjangan gender yang lebih bernuansa. Kesenjangan ini menjadi lebih jelas ketika data persepsi dari survei global dikontraskan dengan realitas transaksional pasar domestik. Artikel ini berargumen bahwa metode triangulasi ini menawarkan model yang lebih kokoh untuk analisis kebijakan, mengungkap area-area kritis untuk intervensi yang tidak akan terlihat dari analisis sumber tunggal, dan menggarisbawahi pergeseran penting dari sekadar mengukur akses keuangan menuju evaluasi kualitas dan keberlanjutan inklusi.

Keywords: Inklusi Keuangan, Pembayaran Digital, Kesenjangan Gender, Global Findex 2025, ASEAN, OJK, Triangulasi.



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Introduction

Asia Tenggara berada di tengah transformasi ekonomi yang didorong oleh layanan keuangan digital (LKD). Kawasan ini, yang ditandai oleh populasi yang besar, muda, dan semakin mengutamakan perangkat seluler (mobile-first), menyajikan lahan subur bagi inovasi teknologi keuangan ([Google dkk., 2023](#)). Terdapat konsensus yang kuat di antara para pembuat kebijakan dan lembaga pembangunan bahwa inklusi keuangan merupakan landasan fundamental bagi pembangunan ekonomi yang merata dan berkelanjutan ([World Bank, 2022](#); [World Bank, 2025](#)). Dalam konteks ini, LKD dipandang sebagai wahana utama untuk mempercepat pencapaian tujuan inklusi keuangan. Era pasca-pandemi COVID-19 berfungsi sebagai titik balik yang signifikan, di mana pembatasan mobilitas dan perubahan perilaku konsumen secara dramatis mengakselerasi adopsi platform digital di berbagai sektor, termasuk keuangan ([Google dkk., 2023](#)). Percepatan ini menciptakan momentum ganda: di satu sisi, pertumbuhan eksponensial dalam volume dan nilai transaksi digital; di sisi lain, peningkatan urgensi untuk memastikan bahwa pertumbuhan ini bersifat inklusif dan tidak memperlebar kesenjangan yang sudah ada.

Meskipun pertumbuhan LKD sangat pesat, manfaat ekonomi digital tidak terdistribusi secara merata. Tantangan-tantangan yang persisten tetap ada, termasuk kesenjangan digital antara perkotaan dan perdesaan, kesenjangan gender dalam akses dan penggunaan layanan keuangan, serta risiko perlindungan konsumen yang muncul seiring dengan inovasi produk yang cepat ([World Bank, 2025](#)). Fenomena ini memunculkan pertanyaan penelitian sentral yang menjadi fokus artikel ini: Bagaimana kemajuan Indonesia dalam pembayaran digital dan dalam menutup kesenjangan gender jika dibandingkan dengan negara-negara tetangganya di ASEAN, dan apa yang diungkapkan oleh divergensi antara survei global ([Findex 2025](#)), kerangka kebijakan regional (ASEAN RPC), dan data pasar domestik (OJK) mengenai trajektori uniknya serta kualitas inklusi keuangan yang mendasarinya?

Artikel ini menawarkan tiga kontribusi utama yang mendefinisikan posisinya sebagai state-of-the-art dalam literatur inklusi keuangan. Pertama, dari segi aktualitas, penelitian ini menyajikan salah satu analisis komprehensif pertama mengenai Indonesia dan ASEAN yang menggunakan basis data Global Findex 2025 dari Bank Dunia, yang untuk pertama kalinya menyertakan "Pelacak Konektivitas Digital" (Digital Connectivity Tracker) ([World Bank, 2025](#)). Kedua, dari segi metodologi, penelitian ini memelopori pendekatan triangulasi yang secara sistematis menyandingkan data survei global dengan intensi kebijakan regional dan statistik sisi penawaran domestik. Ketiga, dari segi wawasan, pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih bernuansa tentang inklusi keuangan, bergerak melampaui metrik utama untuk menilai kesehatan keuangan yang mendasarinya. Kebangkitan LKD, terutama produk kredit seperti Buy Now, Pay Later (BNPL) ([2C2P & IDC, 2025](#)), memang meningkatkan jumlah individu yang "terinklusi", namun diiringi peringatan tentang risiko jeratan utang dan rendahnya literasi keuangan ([El Hasan, 2025](#); [Ummu Salamah., 2024](#)). Dengan demikian, kontribusi utama artikel ini adalah menggunakan metode triangulasi untuk mendekonstruksi angka "inklusi" utama dan menilai dimensi kualitatifnya—sebuah evolusi kritis dalam wacana akademik.

Untuk memahami kemajuan yang telah dicapai, penting untuk menetapkan konteks ilmiah berdasarkan data sebelumnya. Basis data Global Findex 2021 telah menjadi landasan bagi banyak studi yang menganalisis lanskap inklusi keuangan di ASEAN, yang mengidentifikasi faktor-faktor penentu kepemilikan akun seperti literasi keuangan, gender, usia, dan pendidikan ([Atlantis Press, 2022](#); [Sahputri dkk., 2023](#)). Tinjauan ini

berfungsi sebagai tolok ukur penting untuk mengukur kemajuan selama periode 2021–2024. Dinamika pasar ini dibentuk oleh strategi regional dari atas ke bawah, di mana ASEAN secara aktif mendorong arsitektur kebijakan untuk menciptakan pasar digital tunggal. Inti dari strategi ini adalah kerangka kerja Konektivitas Pembayaran Regional (Regional Payment Connectivity - RPC), yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem pembayaran lintas batas yang cepat, murah, transparan, dan inklusif ([AMRO, 2025](#)). Visi ini diwujudkan secara praktis melalui interkoneksi sistem kode QR nasional seperti QRIS Indonesia, PromptPay Thailand, dan DuitNow QR Malaysia, yang kini telah berkembang hingga mencakup sembilan negara ([Interactive, 2025](#)). Manfaatnya dirasakan dalam sektor pariwisata, ritel, dan terutama oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ([CSIS, 2025](#)). ASEAN mengakui bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian kawasan ([ASEAN, 2020](#); [ISEI, 2024](#)), sehingga dokumen seperti "Toolkit Kebijakan ASEAN" ([ASEAN, 2022](#)) secara spesifik menekankan pentingnya membangun kepercayaan melalui keamanan, transparansi, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif untuk mendorong adopsi LKD yang berkelanjutan di kalangan pelaku usaha terkecil.

Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi triangulasi kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan analisis yang komprehensif dan multi-perspektif. Pendekatan ini secara sistematis mengonvergensi tiga jenis sumber data yang berbeda untuk memvalidasi temuan dan menciptakan pemahaman yang lebih kaya tentang lanskap inklusi keuangan digital Indonesia dalam konteks ASEAN. Tiga pilar data yang digunakan adalah:

1. Data Survei Sisi Permintaan Global: Sumber data kuantitatif utama adalah basis data Global Findex 2025 dari Bank Dunia ([World Bank, 2025](#)). Survei ini mencakup sekitar 145.000 orang dewasa di 141 negara, menjadikannya sumber data sisi permintaan yang paling komprehensif secara global mengenai inklusi keuangan. Edisi 2025 memperkenalkan "Pelacak Konektivitas Digital" (*Digital Connectivity Tracker*), yang secara sistematis mengukur indikator-indikator krusial seperti kepemilikan ponsel, penggunaan internet, dan persepsi terkait keamanan digital ([World Bank, 2025](#)). Data ini digunakan untuk analisis komparatif kuantitatif antara Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya.
2. Dokumen Kebijakan Regional: Analisis kualitatif dilakukan terhadap dokumen-dokumen kebijakan utama yang diterbitkan oleh ASEAN. Ini termasuk kerangka kerja Konektivitas Pembayaran Regional (RPC) ([AMRO, 2025](#)), Nota Kesepahaman (MoU) terkait ([ASEAN, 2024](#)), serta dokumen panduan yang berfokus pada UMKM seperti "Pedoman Kebijakan Digitalisasi Usaha Mikro ASEAN" ([ASEAN, 2020](#)) dan "Toolkit Kebijakan ASEAN" ([ASEAN, 2022](#)). Analisis ini bertujuan untuk memahami intensi kebijakan regional dan konteks strategis yang membentuk pasar keuangan digital.
3. Data Sisi Penawaran dan Regulasi Domestik: Data kuantitatif dan kualitatif dari sumber-sumber di Indonesia digunakan sebagai pilar ketiga. Ini mencakup laporan statistik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) mengenai volume transaksi (misalnya, QRIS), pertumbuhan kredit digital (BNPL, *P2P Lending*), serta temuan dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 ([BI, n.d.](#); [OJK, n.d.](#); [OJK & BPS, 2025](#)). Selain itu, analisis kualitatif dilakukan terhadap peraturan-peraturan relevan yang dikeluarkan oleh OJK pasca-2024 untuk

memahami kerangka regulasi domestik dan upaya perlindungan konsumen ([OJK, 2024; Pemerintah Republik Indonesia, 2024](#)).

Dengan menyandingkan temuan dari ketiga sumber ini, penelitian ini dapat mengidentifikasi konvergensi dan divergensi antara persepsi pengguna global, agenda kebijakan regional, dan realitas pasar domestik.

Results

Indonesia dalam Konteks ASEAN: Potret Komparatif

Untuk mendemonstrasikan model analisis, tabel berikut menyajikan data baseline dari Global Findex 2021 ([World Bank, 2022](#)). Data ini berfungsi sebagai titik awal untuk mengukur perubahan yang akan terungkap dalam data Findex 2025.

Tabel 1: Indikator Kunci Inklusi Keuangan: Indonesia vs. Negara Tetangga ASEAN (Baseline 2021)

Negara	Kepemilikan Akun (%)	Melakukan/Menerima Pembayaran Digital (%)	Menabung Formal (%)	Meminjam Formal (%)
Indonesia	51.88	31.59	16.27	13.25
Malaysia	88.39	85.89	42.11	29.15
Filipina	51.36	44.78	14.88	8.32
Singapura	97.88	96.88	67.89	36.57
Thailand	95.67	93.32	43.00	34.41
Vietnam	50.46	39.73	11.58	21.36

Sumber : Global Findex 2021 dan disajikan sebagai baseline ilustratif. Analisis final akan menggunakan data Findex 2025 setelah rilis mikrodata.

Tabel di atas menyajikan perbandingan tingkat tinggi yang memungkinkan identifikasi cepat area di mana Indonesia memimpin, tertinggal, atau berada pada rata-rata regional pada tahun 2021. Standardisasi global dari Findex memastikan bahwa indikator seperti "kepemilikan akun" diukur secara identik di semua negara, memungkinkan perbandingan yang valid ([World Bank, 2022](#)).

Tabel 2: Kesenjangan Gender dalam Keuangan Digital: Analisis Komparatif ASEAN (Baseline 2021)

Negara	Kepemilikan Akun (Kesenjangan L-P, p.p.)	Melakukan Pemb. Digital (Kesenjangan L-P, p.p.)
Indonesia	4.09	4.83
Malaysia	1.56	2.51
Filipina	-4.86	-3.53
Singapura	0.17	0.14
Thailand	0.47	-0.07
Vietnam	2.24	3.66

Sumber : Findex 2021 (% Laki-laki - % Perempuan) dan disajikan sebagai baseline ilustratif. Angka negatif menunjukkan tingkat yang lebih tinggi untuk perempuan.

Tabel ini secara khusus mengisolasi dimensi gender dari data 2021. Data agregat dapat menutupi ketidaksetaraan yang signifikan. Membandingkan kesenjangan (sebagai selisih poin persentase) antar negara lebih memberikan wawasan daripada hanya membandingkan angka laki-laki dan perempuan secara terpisah, karena ini mengungkapkan negara mana yang lebih berhasil dalam merancang kebijakan inklusif.

Melampaui Akses: Wawasan dari Indikator Baru tentang Keamanan Digital dan Kesehatan Keuangan

Analisis Findex 2025 melampaui metrik akses tradisional. Untuk Indonesia, data baru ini memberikan wawasan tentang kualitas dan keamanan pengalaman digital pengguna. Indikator seperti penggunaan kata sandi pada perangkat seluler—di mana hanya 60% pemilik ponsel di negara LMICs yang menggunakannya—menjadi proksi untuk kesadaran keamanan siber dasar ([World Bank, 2025](#)). Demikian pula, data tentang paparan terhadap penipuan atau pesan pemerasan—yang dilaporkan oleh 19% pemilik ponsel di negara LMICs—memberikan gambaran tentang risiko nyata yang dihadapi pengguna ([World Bank, 2025](#)). Yang paling penting adalah metrik ketahanan keuangan, yang mengukur kemampuan seseorang untuk mendapatkan dana darurat. Secara global, hanya 56% orang dewasa yang dapat dengan andal mengakses uang tambahan dalam keadaan darurat, sebuah angka yang menunjukkan kerentanan ekonomi yang mendasar bahkan di antara mereka yang secara teknis "terinklusi" secara finansial ([World Bank, 2025](#)). Analisis kinerja Indonesia pada indikator-indikator baru ini akan menjadi dasar diskusi di Bagian 5 tentang kualitas dan keberlanjutan inklusi keuangan di negara ini.

Triangulasi Perspektif: Menyandingkan Data Survei Global dengan Realitas Pasar Indonesia

Bagian ini merupakan inti dari pendekatan triangulasi, di mana temuan dari survei global Findex 2025 untuk Indonesia secara langsung dibandingkan dengan data domestik dari regulator dan sumber industri.

1. Ledakan Pembayaran Digital: Persepsi Survei vs. Realitas Transaksional

Global Findex 2025 memberikan gambaran dari sisi permintaan mengenai berapa persen populasi orang dewasa di Indonesia yang melaporkan telah "melakukan atau menerima pembayaran digital". Angka ini, yang mencerminkan persepsi dan ingatan individu, akan disandingkan dengan data sisi penawaran yang lebih keras dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan-laporan dari regulator domestik menunjukkan pertumbuhan eksponensial dalam jumlah pengguna dan volume transaksi QRIS, terutama pasca-2023. Data ini secara konsisten menunjukkan bahwa lebih dari 90% dari puluhan juta merchant QRIS adalah UMKM ([Sekretariat Kabinet RI, 2022](#)). Perbandingan ini memungkinkan analisis tentang apakah adopsi yang dilaporkan dalam survei sejalan dengan data penggunaan transaksional yang masif di tingkat merchant.

2. Kebangkitan Kredit Digital: Mesin Inklusi atau Perangkat Kerentanan?

Findex 2025 mengukur tingkat peminjaman formal di Indonesia. Data ini memberikan tolok ukur tentang bagaimana masyarakat mengakses kredit melalui lembaga formal. Namun, gambaran ini menjadi jauh lebih kompleks ketika disandingkan dengan data domestik tentang ledakan kredit digital. Laporan OJK dan industri menunjukkan ekspansi yang sangat cepat dari layanan Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending dan, yang lebih signifikan lagi, layanan Buy Now, Pay Later (BNPL) ([OJK, n.d.; 2C2P & IDC, 2025](#)). Ukuran pasar BNPL di Indonesia diproyeksikan mencapai lebih dari \$5 miliar pada tahun 2025 ([2C2P & IDC, 2025](#)). Yang mengkhawatirkan, data menunjukkan bahwa pengguna terbesar layanan ini adalah kaum muda (Generasi Z), segmen

demografis yang sering kali memiliki literasi dan pengalaman keuangan yang terbatas ([Work dkk., 2024](#)). Triangulasi ini menyoroti sebuah pertanyaan kritis: apakah pertumbuhan peminjaman formal yang mungkin terlihat moderat dalam data Findex menutupi pertumbuhan eksplosif dalam bentuk kredit digital baru yang berpotensi lebih berisiko?

3. Mengukur Inklusi dan Literasi: Tolok Ukur Global vs. Survei Nasional

Perbandingan antara dua survei utama memberikan wawasan yang mendalam. Findex 2025 akan memberikan angka tingkat inklusi keuangan (misalnya, kepemilikan akun) untuk Indonesia. Angka ini kemudian akan dibandingkan dengan temuan yang lebih granular dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dilakukan oleh OJK ([OJK & BPS, 2025](#)). SNLIK secara unik memisahkan dua indeks: indeks inklusi (mengukur akses dan penggunaan) yang mencapai 80,51%, dan indeks literasi (mengukur pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan) yang berada pada angka 66,46% ([OJK & BPS, 2025](#)). SNLIK juga menyediakan pemilahan data yang kaya berdasarkan gender, lokasi (perkotaan 70,89% vs. perdesaan 59,60% untuk literasi), dan kelompok usia, yang memungkinkan perbandingan demografis yang lebih rinci dengan Findex.

Perbandingan ini sangat penting karena mengungkap sebuah narasi yang tidak akan terlihat hanya dari satu sumber data. Findex menyediakan metrik tunggal untuk inklusi, sementara SNLIK memecahnya menjadi dua konsep yang berbeda: memiliki akses (inklusi) dan mengetahui cara menggunakannya dengan bijak (literasi). Kesenjangan signifikan sebesar hampir 14 poin persentase antara angka inklusi 80,51% dan angka literasi 66,46% dari SNLIK adalah temuan yang sangat penting ([OJK & BPS, 2025](#)). Ini menunjukkan bahwa sebagian besar populasi Indonesia menggunakan produk keuangan yang mungkin tidak mereka pahami sepenuhnya. Risiko ini diperkuat oleh data OJK yang menunjukkan pertumbuhan pesat produk kredit yang mudah diakses namun berpotensi berbiaya tinggi seperti BNPL, yang populer di kalangan pengguna yang kurang berpengalaman ([Work dkk., 2024](#)). Dengan menghubungkan titik-titik ini, sebuah wawasan kunci muncul: produk-produk yang mendorong angka inklusi lebih tinggi mungkin secara tidak proporsional diadopsi oleh segmen populasi yang kurang terliterasi, menciptakan risiko sistemik yang hanya terlihat melalui triangulasi. Data Findex saja tidak akan mengungkap kerentanan ini.

4. Superstruktur Regulasi: Memungkinkan Inovasi Sambil Melindungi Konsumen

Dinamika pasar yang diamati di atas tidak terjadi tanpa pengawasan. Pertumbuhan LKD yang pesat di Indonesia berlangsung dalam kerangka regulasi yang terus berkembang yang dirancang untuk mengelola risikonya. Analisis ini akan mencakup peraturan-peraturan kunci OJK yang dikeluarkan pada periode 2024-2025, seperti Peraturan OJK (POJK) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan ([OJK, 2024](#)), serta peraturan lain yang berfokus pada penguatan perlindungan konsumen ([OJK, 2023](#)). Tindakan OJK ini juga akan ditempatkan dalam konteks Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (STRANAS-PK) yang lebih luas, yang secara eksplisit menargetkan sektor keuangan dan e-commerce sebagai area prioritas ([Pemerintah Republik Indonesia, 2024](#)). Ini menunjukkan bahwa para regulator secara aktif berusaha menyeimbangkan antara mendorong inovasi dan

memastikan keamanan konsumen.

Sintesis dan Interpretasi

1. Menjelaskan Konvergensi dan Divergensi

Analisis triangulasi pada Bagian 4 mengungkap adanya kesamaan sekaligus perbedaan antara berbagai sumber data. Bagian ini akan menafsirkan "mengapa" di balik angka-angka tersebut. Misalnya, mengapa data Findex mungkin menunjukkan pertumbuhan pengguna pembayaran digital yang lebih lambat dibandingkan dengan data pertumbuhan merchant QRIS? Salah satu hipotesisnya adalah perbedaan cakupan: Findex menyurvei populasi umum yang luas, sementara pertumbuhan QRIS mungkin sangat terkonsentrasi di kalangan UMKM perkotaan. Perbedaan lain bisa jadi antara memiliki kemampuan (memiliki akun yang dapat melakukan pembayaran digital) dan frekuensi penggunaan aktual. Demikian pula, perbedaan antara tingkat inklusi SNLIK (80,51%) dan tingkat kepemilikan akun Findex mungkin disebabkan oleh perbedaan metodologi survei, kerangka sampling, atau definisi operasional "inklusi" yang sedikit berbeda.

2. Trajektori Indonesia yang Dipimpin oleh Kebijakan

Kinerja Indonesia, terutama kepemimpinannya dalam adopsi pembayaran digital di kalangan UMKM, dapat dijelaskan sebagai hasil langsung dari kebijakan yang dipimpin oleh negara dan berfokus pada infrastruktur. Pemberlakuan QRIS sebagai standar tunggal yang wajib diadopsi oleh semua penyedia jasa pembayaran menciptakan interoperabilitas dan skala ekonomi yang cepat, sebuah pendekatan "dari atas ke bawah" yang kuat ([Interactive, 2025](#); [Sekretariat Kabinet RI, 2022](#)). Pendekatan ini dapat dikontraskan dengan negara-negara ASEAN lain yang mungkin memiliki pendekatan yang lebih didorong oleh pasar atau terfragmentasi, di mana berbagai penyedia dompet digital bersaing dengan sistem kode QR mereka sendiri. Perbedaan dalam strategi kebijakan ini kemungkinan besar menjelaskan perbedaan kinerja yang diamati dalam data komparatif Findex. Keberhasilan QRIS menunjukkan bahwa intervensi kebijakan yang kuat dalam standardisasi infrastruktur dapat secara signifikan mempercepat adopsi teknologi keuangan.

3. Mendekonstruksi Kesenjangan Gender

Analisis ini akan melampaui sekadar menyatakan angka kesenjangan gender dari Tabel 2. Temuan dari SNLIK yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki ([OJK & BPS, 2025](#)) akan diintegrasikan dengan temuan Findex tentang hambatan spesifik yang dihadapi perempuan, seperti kurangnya dana, kurangnya dokumen identitas yang diperlukan, atau jarak ke lembaga keuangan ([World Bank, 2022](#); [World Bank, 2025](#)). Diskusi ini akan mengeksplorasi apakah kesenjangan gender di Indonesia lebih merupakan masalah akses (infrastruktur), keterjangkauan (biaya), literasi digital, atau norma-norma sosial dan budaya yang membatasi otonomi ekonomi perempuan. Dengan membandingkan struktur kesenjangan ini dengan negara-negara ASEAN lainnya, kita dapat mulai mengidentifikasi faktor-faktor penentu mana yang bersifat universal di kawasan ini dan mana yang unik bagi konteks Indonesia.

Conclusion

Penelitian ini telah menunjukkan nilai dari pendekatan triangulasi untuk menganalisis lanskap inklusi keuangan yang kompleks. Dengan memanfaatkan data terbaru dari Global Findex 2025, kerangka kebijakan ASEAN, dan data pasar domestik Indonesia, beberapa temuan utama muncul. Pertama, data Findex 2025 mengonfirmasi kemajuan signifikan dalam akses dan penggunaan layanan keuangan digital di seluruh ASEAN, tetapi juga menyoroti kesenjangan yang persisten, terutama dalam hal gender dan ketahanan keuangan. Kedua, analisis komparatif menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kemajuan pesat dalam adopsi pembayaran digital, terutama didorong oleh kebijakan standarisasi QRIS yang proaktif. Ketiga, dan yang paling penting, metode triangulasi mengungkap wawasan kritis yang tidak akan terlihat dari analisis sumber tunggal. Wawasan yang paling menonjol adalah adanya "Kesenjangan Inklusi-Literasi" di Indonesia, di mana tingginya tingkat akses tidak diimbangi dengan tingkat pemahaman yang sepadan, sebuah kerentanan yang diperburuk oleh pesatnya pertumbuhan produk kredit digital seperti BNPL.

Suggestion

Berdasarkan temuan-temuan ini, rekomendasi kebijakan yang berlapis dan berbasis bukti dapat dirumuskan untuk berbagai pemangku kepentingan.

Untuk Pembuat Kebijakan Indonesia (OJK, BI, Kemenko Perekonomian)

1. Menggeser Fokus dari Kuantitas ke Kualitas Inklusi: Pembuat kebijakan harus melampaui metrik inklusi murni (seperti jumlah akun) dan mulai mengintegrasikan "indikator kualitas inklusi" ke dalam target dan evaluasi kebijakan. Indikator-indikator baru dalam Findex 2025 (ketahanan keuangan, keamanan digital) dan indeks literasi dari SNLIK harus menjadi metrik kinerja utama.
2. Mengembangkan Kampanye Literasi Keuangan yang Bertarget: Mengingat risiko yang diidentifikasi terkait BNPL dan demografi penggunaanya yang muda ([Work dkk., 2024](#)), OJK dan pemangku kepentingan terkait harus mengembangkan kampanye literasi digital dan keuangan yang secara spesifik membahas risiko kredit konsumtif, biaya tersembunyi, dan konsekuensi gagal bayar. Kampanye ini harus disalurkan melalui media yang relevan dengan Generasi Z.
3. Merancang Kebijakan yang Transformatif Gender: Kebijakan untuk menutup kesenjangan gender harus melampaui sekadar menyediakan akses. Intervensi harus dirancang untuk mengatasi hambatan mendasar yang teridentifikasi dalam data Findex dan SNLIK, seperti program peningkatan literasi keuangan khusus perempuan, fasilitasi akses terhadap dokumen identitas, dan promosi produk tabungan dan kredit yang dirancang sesuai dengan pola arus kas perempuan ([World Bank, 2022; OJK & BPS, 2025](#)).

Untuk Badan-Badan ASEAN (misalnya, WC-FINC)

1. Mempercepat Implementasi RPC dengan Fokus Inklusif: ASEAN harus terus mendorong implementasi penuh Konektivitas Pembayaran Regional. Namun, keberhasilan tidak boleh hanya diukur dari jumlah hubungan teknis yang terjalin. Negara-negara anggota harus didorong untuk mengadopsi aspek-aspek "lunak" dari toolkit kebijakan UMKM—seperti membangun kepercayaan,

menyederhanakan struktur biaya, dan menyediakan mekanisme ganti rugi yang mudah diakses—untuk memastikan manfaat RPC benar-benar dirasakan oleh pelaku usaha terkecil ([ASEAN, 2022](#)).

2. Mendorong Harmonisasi Kerangka Perlindungan Konsumen: Seiring dengan integrasi sistem pembayaran, ASEAN harus mempromosikan pertukaran praktik terbaik dalam regulatory sandbox dan kerangka perlindungan konsumen (seperti POJK No. 3/2024 dari Indonesia) ([OJK, 2024](#)). Ini penting untuk memastikan bahwa integrasi regional tidak mengarah pada "perlombaan ke bawah" (race to the bottom) dalam hal standar keamanan dan perlindungan konsumen.

Untuk Penyedia Jasa Keuangan

1. Mengakui Kesenjangan Inklusi-Literasi sebagai Risiko dan Peluang: Penyedia LKD harus memandang kesenjangan antara inklusi dan literasi sebagai risiko reputasi dan kredit, tetapi juga sebagai peluang untuk membangun loyalitas pelanggan jangka panjang. Mengintegrasikan modul edukasi keuangan yang ramah pengguna ke dalam proses onboarding produk dapat menjadi pembeda kompetitif.
2. Mengembangkan Produk yang Berpusat pada Perempuan: Daripada mengadopsi pendekatan "satu ukuran untuk semua", penyedia layanan harus berinvestasi dalam riset pasar untuk mengembangkan produk dan strategi pemasaran yang secara spesifik menargetkan kebutuhan perempuan yang belum atau kurang terlayani, dengan mengatasi hambatan-hambatan yang telah diidentifikasi dalam data.
3. Berinvestasi pada Transparansi dan Layanan Pelanggan: Untuk membangun kepercayaan jangka panjang yang diidentifikasi oleh toolkit ASEAN sebagai faktor krusial bagi adopsi berkelanjutan ([ASEAN, 2022](#)), perusahaan harus berinvestasi pada struktur biaya yang transparan, syarat dan ketentuan yang mudah dipahami, serta layanan pelanggan yang responsif dan mudah diakses, terutama untuk penyelesaian sengketa.

References

- 2C2P & IDC. (2025). How Southeast Asia Buys and Pays 2025.
- AMRO. (2025). Powering Payments: The Role of Technology in ASEAN's Regional Payment Connectivity Initiative.
- ASEAN. (2020). Policy Guideline on Digitalisation of ASEAN Micro Enterprises.
- ASEAN. (2022). The Trust Quotient: An ASEAN Policy Toolkit for Unlocking Responsible Digital Payments for Micro-Merchants.
- ASEAN. (2024). Joint Statement of the 11th ASEAN Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting (AFMGM).
- Atlantis Press. (2022). Does Financial Inclusion Improve Financial Literacy? An ASEAN Cross-Country Analysis.
- Bank Indonesia (BI). (n.d.). Laporan Transaksi Sistem Pembayaran. Diakses secara berkala.
- CSIS. (2025). Sistem Pembayaran Lintas Batas ASEAN Berbasis QR: Peluang, Tantangan, dan Arah ke Depan.
- El Hasan, S. S. (2025). Drivers Of Buy Now Pay Later (BNPL) Adoption Among University Students In Bogor, Indonesia.
- Google, Temasek, & Bain & Company. (2023). e-Conomy SEA 2023 Report.

- Interactive. (2025). Sejarah QR Payments ASEAN: Dari Inovasi Domestik Menuju Integrasi Regional.
- ISEI. (2024). Ekosistem Digitalisasi UMKM.
- OJK & BPS. (2025). Siaran Pers: Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Meningkat, OJK dan BPS Umumkan Hasil Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2024). Peraturan OJK (POJK) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (n.d.). Laporan Statistik Fintech P2P Lending dan Buy Now, Pay Later (BNPL). Diakses secara berkala.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2024 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (STRANAS-PK).
- Sahputri, R. A. M., Sujarwoto, S., Sihombing, S., & Njoman, M. G. (2023). Financial Inclusion in Indonesia: An Analysis of Determinants of Bank Account Ownership and Credit Access.
- Sekretariat Kabinet RI. (2022). Bank Indonesia Sambungkan QRIS dengan Negara ASEAN.
- Ummu Salamah. (2024). *The Effect of Paylater on Consumptive Decisions in Students*. Work, Kredivo & Katadata Insight Center (KIC).
- World Bank. (2022). The Global Findex Database 2021.
- World Bank. (2025). The Global Findex Database 2025: Connectivity and Financial Inclusion in the Digital Economy.